

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA



**PALANGKA RAYA
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2019, harus dilakukan Evaluasi Tingkat Capaian Keberhasilannya.

Capaian Keberhasilan / Kinerja yang terakreditasi melalui penilaian dengan standar yang telah ditetapkan sebagai pembandingan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disesuaikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Visi dan Misi Instansi Pemerintah dalam kerangka perwujudan Good Governance.

Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kritik, saran dan pemikiran yang sifatnya membangun sangatlah diperlukan dimasa-masa datang.

Sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama segenap rekan-rekan pejabat/staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas bantuan dan kerja kerasnya dalam pelaksanaan Tugas selama Tahun 2019 ini.

Palangka Raya, Maret 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Ir. JANUMINRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198903 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi	4
1.5 Permasalahan Umum	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis	8
2.3 Kebijakan dan Program	9
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018	11
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019	14
BAB. IV PENUTUP	16
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis	17
Lampiran	18
Capaian realisasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019	18



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mengacu dari Visi dan Misi serta Rencana Strategis sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Aspek Strategis yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan Politik adalah berupa Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan capaian kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, berkaitan dengan kondisi Sosial Ekonomi, Kultural, sehingga berbagai Gejolak Sosial semakin berkurang dan Sinergisme Komunikasi Sosial serta Komunikasi Politik dalam rangka menunjang Pembangunan menjadi semakin ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran Program Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilakukan, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya dapat dikategorikan cukup baik, namun harus dilakoni bahwa masih banyak sasaran yang belum tersentuh capaian target yang diinginkan dalam tahun 2019 dan sebagai langkah perencanaan strategis tahun berikutnya.

Demikian pula Capaian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Kategori Capaian Cukup Baik karena dalam pelaksanaannya dapat memenuhi target kegiatan seperti yang direncanakan.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunrabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam Good Governance dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja Tahun 2019.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

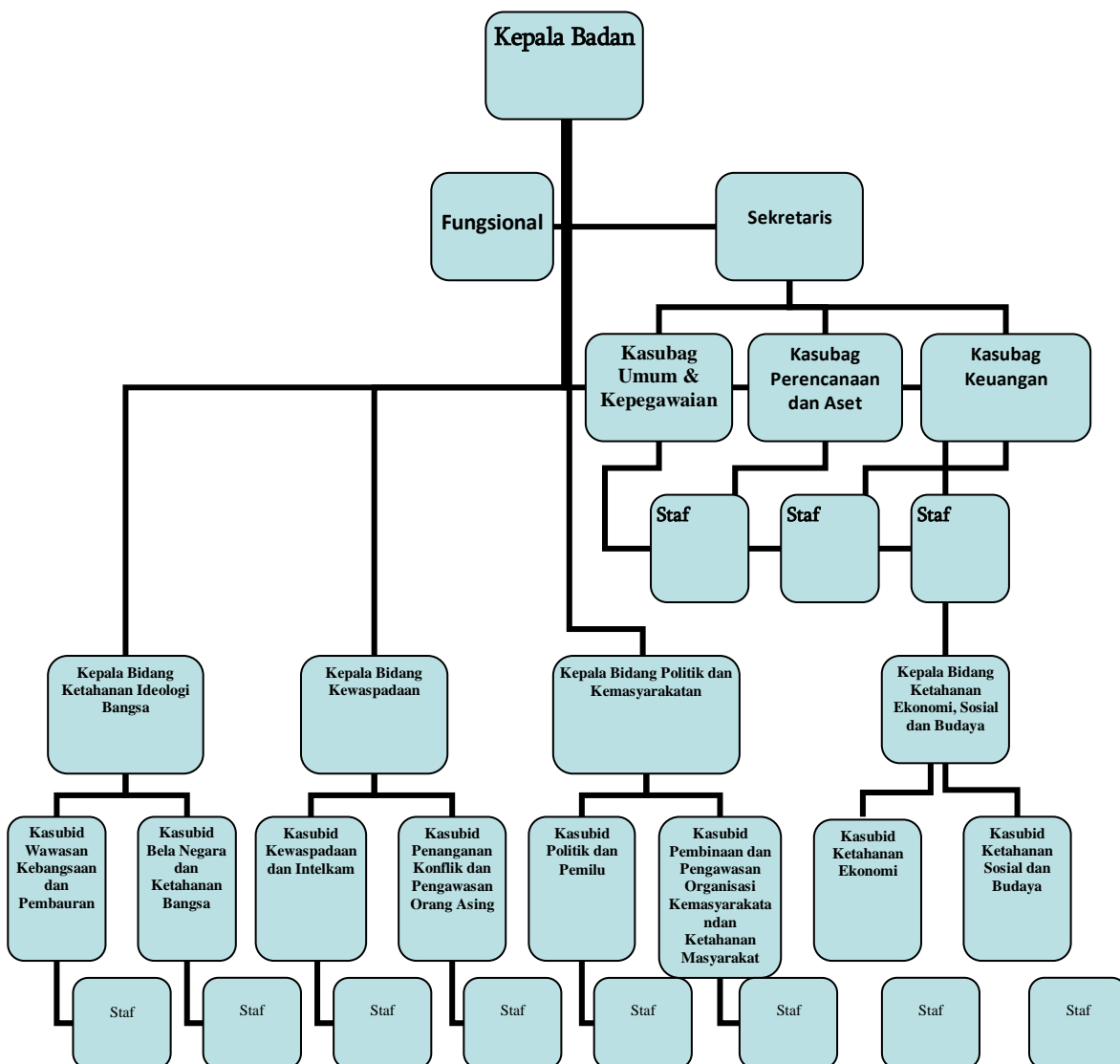
Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya yaitu pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Untuk mengaktualitas tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai struktur organisasi seperti di tunjuk pada gambar 1.1 pada halaman berikut .



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusifitas daerah dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya paham sarat kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualitas Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena sebagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elitanya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitas dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- (1) Mutasi atau promosi pada staf dan pejabat tidak sesuai dengan keadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sehingga masih ada pegawai yang rangkap tupoksi.
- (2) Anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, khususnya menyangkut belanja tidak langsung seperti kegiatan Pelaksanaan Pemilu yang kurang memadai dalam pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemilu.
- (3) Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam politik ;
- (4) Masih kurangnya komunikasi antar Organisasi Politik, Ormas dan Pemuda.
- (5) Menurunnya nilai - nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (6) Fasilitasi pendirian tempat ibadah masih diperlukan karena masyarakat banyak yang kurang paham.
- (7) Masih banyak pelanggaran HAM dan KDRT.
- (8) Pengawasan terhadap orang asing masih lemah.
- (9) Reformasi tentang deteksi dini masih kurang sarana dan prasarana.
- (10) Kesadaran masyarakat masih kurang terutama menyangkut keamanan dan ketertiban.
- (11) Kurangnya informasi yang cepat dan akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat.

1.6 Sistematika Penyajian.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategi Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

- 2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023
- 2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis
- 2.3 Kebijakan dan Program
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019
- C. Realisasi Anggaran Tahun 2019
- D. Analisa Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2019

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.

2.1. RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 antara lain :

- a) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat di Kota Palangka Raya yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
- b) Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kota Palangka Raya, seperti daerah terpencil dan daerah pinggiran sungai, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- c) Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.
- d) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

1. PERNYATAAN VISI.

- a. Bahwa tantangan masa depan yang semakin kompleks yang diwarnai dengan berbagai perubahan dinamis sebagai konsekuensi dari demokratisasi perlu senantiasa diantisipasi secara terus menerus dengan mengembangkan berbagai peluang dan inovasi politik.
- b. Visi yang dirumuskan adalah sebagai aspek strategis dalam mengarahkan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya jauh kedepan pada apa yang ingin dicapai Pemerintah.
- c. Rumusan Visi Kota Palangka Raya adalah **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua”**

2. PERNYATAAN MISI.

Komitmen yang telah disepakati merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Visi Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan dirumuskan dalam Misi dengan ditetapkannya Misi Organisasi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan pihak-pihak berkepentingan lainnya hendaknya dapat mengetahui dengan jelas Peran dan Program Kerja serta hasil yang ingin dicapai Organisasi.

Adapun Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah masuk kedalam misi 2 dari RPJMD yaitu **“Mewujudkan kerukunan seluruh elemen Smart Society (Masyarakat cerdas)”**

Untuk melaksanakan Misi tersebut dibuat program kerja meliputi :

- a. Memanfaatkan iklim kondusif, sosial /Politik masyarakat secara bijaksana untuk partisipasi pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Menyelenggarakan Koordinasi.
- d. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat sekitar Kesatuan Bangsa, Integrasi Kebangsaan.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

2.2 TUJUAN / SASARAN STRATEGIS.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses Perencanaan Strategis Organisasi dari Tahun ketahun Anggaran berikutnya sejalan dengan rumusan untuk masing-masing tujuan yang ingin di capai dalam Tahun Anggaran bersangkutan.

a. Tujuan

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Selain itu arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi pelaksanaan padan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan masukkan dalam menentukan kebijakan anggaran dan penyusunan program kegiatan tingkat Kota Palangka Raya.

b. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kualitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2018 – 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kerukunan elemen masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Indeks toleransi	43

2.3 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Penguatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
2. Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

b. Program

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 yaitu :

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019 antara lain ;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program pendidikan politik

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020-2023 antara lain ;

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Ideologi Wawasan Kebangsaan
3. Program Peningkatan Kewaspadaan
4. Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi
5. Program Peningkatan Pendidikan Politik

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan atau sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Penetapan Kinerja Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	1.	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	30
		2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20
		3.	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	46
		4.	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	92%
		5.	Tingkat partisipasi pemilih	70%
		6.	Indeks Toleransi	43

BAB.III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melalui penetapan kinerja Tahun 2019. dalam penetapan kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 untuk mencapai maksud kinerja dimaksud, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah di tentukan dalam penetapan kinerja Tahun 2019.

Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Sasaran Strategis : Meningkatkan toleransi dikalangan masyarakat

3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2019	Target RPJMD	Realisasi	
					2018	2019
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	30	30	0	4
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20	20	8	32
		Jumlah pertemuan terkait	46	46	0	6

		kerukunan umat beragama				
		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	92%	92%	0	99%
		Tingkat partisipasi pemilih	70%	70%	66%	77,5%
		Indeks Toleransi	43	43	16	43

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 2019 dengan realisasi kinerja tahun 2019. Dari tabel 3.1 Realisasi Kinerja dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi pada masing-masing indikator tahun 2019 masih ada yang tidak mencapai target dan ada juga yang telah melampaui target, hal ini disebabkan oleh :

- a. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya tahun 2019 belum memenuhi target, hal ini dikarenakan indikator program yang targetnya terlalu tinggi dan juga kurangnya anggaran sehingga realisasinya belum bisa dicapai.
- b. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan tahun 2019 telah memenuhi target, hal ini dikarenakan banyaknya Ormas, LSM, Yayasan dll yang melaporkan kembali keberadaannya dan juga banyaknya pengajuan baru untuk pembuatan Ormas, LSM, Yayasan dll.
- c. Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 belum memenuhi target, hal ini dikarenakan target indikator yang terlalu tinggi dan terbatasnya anggaran dalam melakukan kegiatan.
- d. Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan tahun 2019 telah memenuhi target, hal ini dikarenakan proaktifnya penyampaian laporan dalam hal Rencana Aksi Daerah (RAD) Penangan Konflik Sosial di Masyarakat baik ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat.

- e. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 telah memenuhi target dan meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Palangka Raya telah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan Babinsha, Babinkantibnas, Camat, Lurah, RT/RW, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat.
- f. Indeks Toleransi Tahun 2019 telah memenuhi target, hal ini dikarenakan hasil penilaian setara institute untuk kota Palangka Raya berada di peringkat 43 di seluruh kota/kabupaten se Indonesia.

3.2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 pada tabel 3.1 Realisasi Kinerja, dari semua indikator belum adanya target yang terpenuhi dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja dan juga adanya penyesuaian terhadap RPJMD yang baru.

Sedangkan pada Tahun 2019, berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja, dari 6 (enam) indikator kinerja, 4 (Empat) indikator melampaui target dengan pencapaian 2 (dua) indikator $\geq 100\%$ dan 2 (dua) indikator mencapai 100%.

3.2.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2019 berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

- a. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah kota Palangka Raya untuk target RPJMD yaitu 30 tetapi untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 4 kegiatan atau 13% dari target.
- b. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan untuk target RPJMD yaitu 20 tetapi untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 32 surat atau 160% dari target.
- c. Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama untuk target RPJMD yaitu 46 tetapi untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 6 kegiatan atau 13% dari target.

- d. Persentase Capaian Kinerja Pencegahan, Pemulihan untuk target RPJMD yaitu 92% tetapi untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 99% atau 108% dari target.
- e. Tingkat Partisipasi Pemilih untuk target RPJMD yaitu 70% tetapi untuk realisasi tahun 2019 berjumlah 77,5% atau 111% dari target
- f. Indeks Toleransi untuk target RPJMD yaitu Peringkat 43 tetapi untuk realisasi tahun 2019 yaitu berada di peringkat 43 atau 100% dari target.

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2019

Analisis penyebab keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019 berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja yaitu karena adanya peran aktif dalam melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, baik melalui media cetak maupun melewati website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya serta laporan yang telah disampaikan tepat waktu. Sedangkan untuk kegagalan kinerja tahun 2019 disebabkan oleh efisiensi dan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi kembali target pada indikator kinerja pada saat perubahan RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika di lihat dari pagu dana yang diberikan Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tiap tahun anggaran akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik itu Belanja Tidak Langsung maupun belanja langsung untuk menopang kinerja sebagaimana tabel di bawah ini .

No	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2019
1	7.733.294.364,80	8.434.013.479.-

Dengan jumlah 30 orang ASN dan 9 orang PTT yang 30 % latar belakang disiplin ilmunya yang berbeda-beda, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator utama harus benar-benar

diperhitungkan. Namun dengan penurunan anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN Badan Kesatuan dan Politik Kota Palangka Raya menurun. Dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Pencapaian keberhasilan kinerja sasaran di atas didukung oleh pencapaian program yang mendukung pencapaian sasaran antara lain:

3.2 Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Program	Indikator program	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	30	4	13
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20	32	160
		Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	46	6	13
		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	92%	99%	108
		Tingkat partisipasi pemilih	70%	77.5	111
		Dukungan kegiatan kewaspadaan dini	30	4	13
		Indeks toleransi	43	43	100

Program ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mempunyai sasaran meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat pada tahun 2019 dibebani anggaran sebesar Rp. 8.434.013.479.- dengan realisasi Rp. 7.726.327.002 (91.61%).

Program ini didukung oleh 28 kegiatan dimana masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Palangka Raya. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari sekretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya sebesar Rp. 8.434.013.479.- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 5.249.452.950.- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.184.460.529.- Realisasi penggunaan anggaran tersebut di tunjukan pada Tabel 3.6 dan 3.7

Tabel. 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.174.971.200.-	1.113.450.874	95.00
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	408.520.000.-	404.054.300	99.00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.623.750.-	32.488.750	99.99
4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	602.200.000.-	600.199.000	99.99
5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.352.638.000.-	1.347.758.000	99.99
6	Program pendidikan politik masyarakat	1.678.500.000.-	1.657.575.000	99.00
JUMLAH		5.249.452.950.-	7.726.327.002	91.61

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.184.560.529.-	2.570.801.078	80.73

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Palangka Raya sebesar Rp. 8.434.013.479.- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.184.560.529.- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.249.452.950.- Penyerapan anggaran tersebut adalah masing-masing Rp. 5.155.525.924 atau 98.21% untuk belanja langsung dan tidak langsung Rp. 2.570.801.078 atau 80.73 % untuk belanja langsung . Dengan demikian total penyerapan anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.726.327.002 atau 91.61 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung termasuk sangat baik.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya secara umum telah berhasil menyelenggarakan program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada Tahun 2019, yang di ukur melalui pencapaian target indikator kinerja.

Dari luasan lokasi yang seyogyanya menjadi jangkauan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sesuai Visi dan Misi yang diemban dalam Tahun Anggaran 2019 baru sebagian Sasaran Strategis yang memenuhi target Capaian Kinerja. Hal ini terjadi kendala antara lain sebagai berikut :

1. Dana untuk beberapa komponen dari properti yang diusulkan semula.
2. Masih banyak berbagai kalangan yang kurang memahami pentingnya eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dari sisi Pembangunan Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Pembangunan Pgram yang disetujui tidak sesuai seolitik.
3. Sumber Daya Manusia sebagai pendukung Pencapaian Kinerja masih perlu peningkatan kualitas dan keterampilan manajerial yang tinggi dibidangnya, disamping juga kualitas sesuai keperluan.
4. Peralatan pendukung yang tidak kurang pentingnya adalah Peralatan Administrasi dan Sarana Mobilitas untuk memungkinkan kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan.

Dalam perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran.

Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat menjadi tolok ukur bagi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang lebih baik ditahun mendatang.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tidak terlepas dari Kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sekali lagi diperlukan kritik membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Lampiran : Capaian Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

No	KEGIATAN/URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Belanja Pegawai/Personalia	3.184.562.529	2.570.801.078	92.32%
BELANJA LANGSUNG				
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	91.194.150	91.19
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	306.200.000	275.440.884	89.95
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.069.800	16.069.000	100
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.455.650	82.450.290	99.99
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	54.275.000	53.490.000	98.55
6.	Penyediaan Komponen Intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22.800.000	22.800.000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	37.000.000	20.016.000	54.10
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.125.000	36.487.500	98.28
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	388.170.750	384.627.250	99.09
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.000.000	30.000.000	100
11.	Penyediaan jasa event palangka fair	100.875.000	100.875.000	100
B. BELANJA LANGSUNG				
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.000.000	34.000.000	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.500.000	85.500.000	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.520.000	96.054.300	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000	30.000.000	100

B. BELANJA LANGSUNG				
C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1.	Penyusunan pelaporan keuangan	6.000.000	6.000.000	100
2.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	13.350.000	13.350.000	100
3.	Penyusunan program dan rencana kerja	13.273.750	13.138.750	98.98
B. BELANJA LANGSUNG				
D. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				
1.	Kominda Kota Palangka Raya	324.350.000	324.350.000	100
2	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota palangka Raya	277.850.000	275.849.000	99.28
B. BELANJA LANGSUNG				
E.PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				
1.	Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB)	241.419.000	238.419.000	98.76
2	Ikrar anak bangsa	167.719.000	167.719.000	100
3	Pembauran kebangsaan	819.900.000	818.020.000	99.77
4	Forum Bela Negara	123.600.000	123.600.000	100
B. BELANJA LANGSUNG				
F. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				
1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1.272.250.000	1.272.250.000	100
2	TimVerifikasi kelengkapan administrasi partai politik	45.250.000	45.225.000	99.94
3	Kegiatan Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Presiden/Legislatif/Kepala daerah	361.000.000	340.100.000	94.21
B. BELANJA LANGSUNG				
H. BELANJA MODAL				
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	158.500.000	158.500.000	100
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG		8.434.013.479	7.726.327.002	91.61

